



Intisari

Pemerintah Indonesia membatasi bantuan kemanusiaan dari pihak asing dalam penanggulangan bencana Palu tahun 2018. Pemerintah lebih memfokuskan penerimaan bantuan asing dari skema *Government to Government*. Regulasi tersebut cukup menyulitkan *International Non-Governmental Organizations* yang ingin menyalurkan bantuan ke Palu karena akses kemanusiaan menjadi cukup terbatas. Dengan menggunakan konsep *humanitarian acces*, regulasi pemerintah terhadap *Non-Governmental Organizations*, serta konsep *Non-Governmental Organizations*, tesis ini akan menjelaskan mengenai faktor yang mampu mendorong OXFAM untuk dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan secara cepat dan efisien bagi korban bencana Palu tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi atas aktivitas NGO di Indonesia dan perubahan strategi yang dilakukan oleh OXFAM, mampu mendorong OXFAM untuk membuka dan mempertahankan akses kemanusiaan dalam bencana Palu tahun 2018.

Kata kunci: *Non-Governmental Organizations*, OXFAM, Bantuan Kemanusiaan, Pendekatan *bottom-up*, *Humanitarian Access*



Abstract

The Indonesian government has limited foreign humanitarian aids during the Earthquake and Liquefaction Disaster Management in Palu in 2018. The government prioritized Government to Government foreign aid. The limitation inhibited International Non-Governmental Organizations that expected to distribute humanitarian aid to Palu. This thesis explains factors encouraging OXFAM in distributing humanitarian aid to Palu in fast and efficient ways based on the concept of humanitarian access, government regulations on Non-Governmental Organizations, and the concept of Non-Governmental Organizations. Changes in the regulations concerning NGO activities in Indonesia and changes in the strategies employed by OXFAM were factors that encouraged OXFAM to open humanitarian aid access in Palu in 2018.

Keywords: Non-Governmental Organizations, OXFAM, Humanitarian aids, Bottom-up, Humanitarian Access